

**ANALISIS *WILLINGNESS TO PAY* JAMINAN KECELAKAAN KERJA
BAGI PENGEMUDI *ONLINE* MOTOR
(Studi Kasus Pada PT. Gojek Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung)**

(Tesis)

Oleh:

Putri Rizki Indah Larasati



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS *WILLINGNESS TO PAY* JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PENGEMUDI *ONLINE* MOTOR (Studi Kasus Pada PT. Gojek Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung)

Oleh

Putri Rizki Indah Larasati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan, tingkat Pendidikan, usia, jenis kelamin dan pengetahuan mengenai program Jaminan Kecelakaan Kerja dapat meningkatkan probabilitas nilai *Willingness to Pay* (WTP) pengemudi ojek *online* untuk keikutsertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta untuk mengetahui nilai rata-rata WTP pengemudi ojek *online* untuk membayar keikutsertaan JKK dan bagaimana preferensi pengemudi ojek *online* terhadap manfaat antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada penelitian ini digunakan data primer, dimana peneliti melakukan survey terhadap 100 pengemudi *online* motor Go-Jek di Kota Bandar Lampung. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah nilai WTP, tingkat pendapatan, tingkat Pendidikan, usia, jenis kelamin, dan pengetahuan mengenai program. Alat analisis yang dipergunakan adalah Regresi *Binary Logistic* untuk menjawab hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dan *Contingent Valuation Method* untuk mendapatkan nilai rata-rata WTP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan pengetahuan mengenai program meningkatkan probabilitas nilai WTP, sedangkan untuk variabel usia dan jenis kelamin tidak meningkatkan atau menurunkan probabilitas nilai WTP. Nilai rata-rata WTP Jaminan Kecelakaan Kerja yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebesar Rp 15.700,-. Sebanyak 73% pengemudi ojek *online* lebih memilih menyukai manfaat dari BPJS Kesehatan dan 27% lainnya lebih memilih menyukai manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Nilai *Willingness to Pay*, Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Usia, Jenis Kelamin, Pengetahuan mengenai Program, Regresi *Binary Logistic*, *Contingent Valuation Method* (CVM)

ABSTRACT

ANALYSIS OF WILLINGNESS TO PAY WORK ACCIDENT INSURANCE FOR ONLINE MOTORCYCLE DRIVERS

(Case Study at PT. Gojek Indonesia Bandar Lampung)

By

Putri Rizki Indah Larasati

This study aims to know how much of income level, education level, age, gender and knowledge about program on the Willingness to Pay (WTP) can increase probability value of online motorcycle taxi drivers for participation in Work Accident Insurance and to determine the WTP value for online motorcycle drivers to pay their participation in Work Accident Insurance. In this study the data we used were primary data, sample in this study was 100 Go-Jek online motorcycle taxi drivers in Bandar Lampung City. The variables used in this study were the value of WTP, income, education level, age, gender, and knowledge of the Work Accident Insurance program. The analytical tool used is the Binary Logistic Regression to answer the relationship of the independent variable to the dependent variable and the Contingent Valuation Method to get the WTP value. The results of this study indicate that the variables Income, Education Level and Knowledge of the Work Accident Insurance Program can increase probability on the WTP value, while the age and gender variables can't increase or decrease probability on the WTP value. The WTP value for Work Accident Insurance obtained in this study is IDR 15,700.

Keywords: Willingness to Pay Value, Income, Education Level, Age, Gender, Knowledge of the Work Accident Insurance Program, Binary Logistic Regression, Contingent Valuation Method (CVM)

**ANALISIS WILLINGNESS TO PAY JAMINAN KECELAKAAN KERJA
BAGI PENGEMUDI ONLINE MOTOR
(Studi Kasus Pada PT. Gojek Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Oleh:

Putri Rizki Indah Larasati

(Tesis)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MASTER EKONOMI

Pada

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis

: ANALISIS *WILLINGNESS TO PAY* JAMINAN
KECELAKAAN KERJA BAGI PENGEMUDI
ONLINE MOTOR (Studi Kasus Pada PT. Gojek
Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung)

Nama mahasiswa

: **Putri Rizki Indah Larasati**

No. Induk Mahasiswa

: 2121021009

Program Studi

: Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.

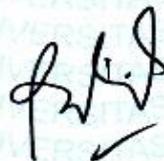
Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.

NIP. 19670710 199003 2001

NIP. 19770729 200501 1001

MENGETAHUI

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M.

NIP. 19800705 200604 2002

MENGESAHKAN

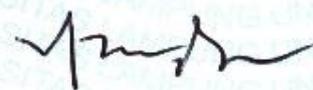
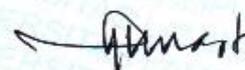
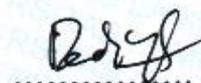
1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**

Sekretaris : **Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**

Penguji I : **Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.**

Penguji II : **Dr. Neli Aida, S.E., M. Si.**

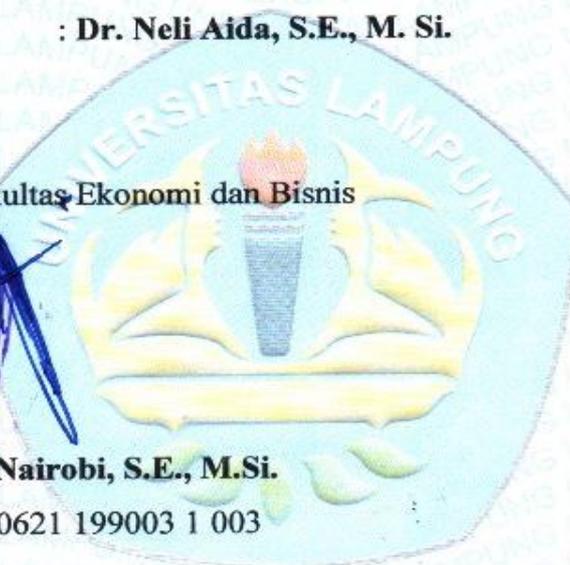


2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003



3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. H. Murhadi, M.Si

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 4 Desember 2023

**PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar. Maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023

Penulis,



PUTRI RIZKI INDAH LARASATI

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Tanjung Karang pada tanggal 17 Mei 1993, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak (Alm) Indra Dermawan Agung dan Ibu Nuri Indra.

Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) Pertiwi Teladan Metro diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Metro diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Metro diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan pada tahun 2015. Penulis pernah berkerja sebagai Account Representative Khusus BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung pada tahun 2017-2020.

Selanjutnya pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan” (Q.S: Al-Insyirah
Ayat 5-6)

“Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran”
(Abu Bakar Ash Shiddiq)

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu Bersama kita”
(Q.S: At-Taubah: 40)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis persembahkan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kepada orang tua penulis yang terhormat, yang tersayang, dan yang penulis banggakan yaitu Bapak (Alm) Ahmad Indra Dermawan Agung dan Ibu Nuri Indra. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan dan semua hal yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan pernah bisa terbalas.

Untuk Suamiku Izzuddin Yahya Al-qassam dan anakku Muhammad Khalif Atharrazka yang telah memberikan semangat dan dukungan serta menjadi tempat berbagi Bahagia dan sedih.

Abi Hery Novpriansyah, Umi Nita Yunitasari, Kakak dan adikku Ahmad Syah Putra Utama, M. Nalom Syah Alam, Nina, Usamah, Jundi, Ammar, Dwita, Rosyad, Yaya, Agungan Laeina, Kiyay Fariz yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kepercayaan bagi penulis.

Serta tak lupa,

Almamater tercinta, Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobil alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis *Willingness To Pay* Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pengemudi *Online* Motor (Studi Kasus Pada PT. Gojek Indonesia Cabang Bandar Lampung)” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Master Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, IPM selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Marselina Djayasinga, S.E., M.P.M selaku dosen Pembimbing I, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menjalankan studi di Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.

6. Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan tesis ini dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya, serta memberikan saran, arahan ataupun masukan kepada penulis.
7. Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. selaku dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan saran pada tesis ini.
8. Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus sebagai dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan saran pada tesis ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
10. Terimakasih kepada Uni Mimi, Ibu Yati, Mas Budi, yang telah memberikan semangat, dukungan, makanan, dan ruangan yang begitu nyaman untuk penulis dalam menunggu kepastian dari dosen, serta berbagai hal kepengurusan administrasi lainnya.
11. Orangtua Tercinta, Bapak (Alm) Ahmad Indra Dermawan Agung dan Ibu Nuri Indra serta Abi Hery Novpryansyah dan Umi Nita Yunitasari yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis, terima kasih untuk segalanya.
12. Suami dan anak tercinta, Izzuddin Yahya Al-qosam dan Muhammad Khalif Atharrazka yang menjadi motivasi dan pendukung utama.
13. Tak terlupa kakak dan adikku Ahmad Syah Putra Utama, Nalom, Nina, Usamaha, Jundi, Kyay Fariz, Agungan Laeina, Rosyad, Wilda, Ammar, Dwita yang selalu mendukung secara moril dan memberikan doa yang tulus.
14. Om, Tante dan seluruh keluarga besar yang sudah memberikan dukungan, terutama tante Nurbaiti, Ami Teguh, Ama.
15. Kawan-Kawan seperjuangan Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 2021, Desi, Hafidz, Sony, Bobby, Bang Imron, Daffa, Cyntia, Dechi, dan

Nina. Terima kasih kepada rekan-rekan atas kebersamaan selama ini yang sudah berjuang bersama-sama dari perkuliahan awal hingga menyelesaikan tesis. Semoga kedepannya kita MIE 2021 menjadi orang sukses semuanya, Aamiin.

16. Terima kasih kepada Universitas Lampung atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga penulis dapat mewujudkan mimpi penulis untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi, semoga ilmu dan pengetahuan yang penulis peroleh dapat berguna kedepannya khususnya untuk penulis, serta bagi nusa, bangsa, dan agama.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga tesis ini selesai.

Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan kita. Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah diharapkan penulis. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023

Penulis,

PUTRI RIZKI INDAH LARASATI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Teoritis.....	13
2.1.1. Teori Barang Publik	14
2.1.2. Penentuan Harga Pelayanan Publik.....	15
2.1.3. Pelayanan Publik	17
2.1.4. Asuransi	21
2.1.5. Sistem Jaminan Sosial Nasional	22
2.1.6. BPJS Ketenagakerjaan.....	24
2.1.7. Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi PBPU.....	26
2.1.8. <i>Willingnes to Pay</i>	28
2.1.9. <i>Contingent Valuation Method</i>	28
2.2. Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran	32
2.4 Hipotesis Penelitian	33
III. METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	34
3.2 Definisi Operasional Variabel	34
3.2.1. <i>Willingnes to Pay</i>	34
3.2.2. Pendapatan Per-Bulan.....	35
3.2.3. Pendidikan	35

3.2.4. Usia.....	35
3.2.5. Jenis Kelamin	35
3.2.6. Pengetahuan tentang program JKK	35
3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	35
3.4. Pengambilan Sampel	36
3.4. Metode Analisis.....	37
3.4.1. Statistik Deskriptif.....	37
3.4.2. Metode Analisis Contingent Valuation Model.....	37
3.4.3. Uji Validitas dan Uji Realiabilitas.....	38
3.4.4. Analisis Regresi Binary Logistic	39
3.4.5. Uji Hipotesis Statistik.....	40
3.4.6. Model Analisis <i>Contingent Valuation</i>	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.2. Nilai WTP Pengemudi Ojek Online Terhadap JKK	46
4.3. Hasil Regresi Binary Logistic	50
4.4. Uji Kelayakan Model	51
4.5. Uji Hipotesis.....	51
4.5.1. Uji z-statistik	51
4.5.2. Uji LR statistik	52
4.6. Perbandingan preferensi responden antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.....	53
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
4.7.1. Hasil Regresi Model Penelitian	53
4.7.2. Hubungan Pendapatan Terhadap WTP.....	55
4.7.3. Hubungan Pendidikan Terhadap WTP	57
4.7.4. Hubungan Usia Terhadap WTP.....	59
4.7.5. Hubungan Jenis Kelamin Terhadap WTP	60
4.7.6. Hubungan Pengetahuan Mengenai Program Terhadap WTP.....	62
4.7.7. Nilai <i>Willingness To Pay</i>	63
4.7.8. Perbandingan Preferensi responden antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.....	65

V. SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Simpulan.....	68
5.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

1.1. Perbedaan antara BPJS Kesehatan, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan....	2
1.2. Data Pekerja Sektor Formal, Informal dan Informal terdaftar Jaminan Kecelakaan Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2021.....	5
1.3. Data Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Mobil dan Motor Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2021	6
1.4. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2021	7
1.5. Data Jumlah Mitra Pengemudi <i>Online</i> Motor AAktif dan Penghasilan Rata-rata Perhari pada Gojek, Grab dan Maxim.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu	30
3.1. Kriteria Sampel	36
3.2. Bidding Game	38
3.3 Hasil Uji Validitas	43
3.4 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.2 Skenario Peningkatan Manfaat dan Iuran Program JKK	47
Tabel 4.3 Nilai Dugaan Rata-rata WTP	48
Tabel 4.4 Nilai TWTP	49
Tabel 4.5 Hasil Regresi <i>Binary Logistic</i>	50
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	51
Tabel 4.7 Hasil Uji z-statistik	52
Tabel 4.8 Hasil Uji LR-statistik	53
Tabel 4.9 Persentase Perbandingan Preferensi	53
Tabel 4.10 Pendapatan per bulan Responden	55
Tabel 4.11 Tingkat Pendidikan Responden	58
Tabel 4.12 Pengetahuan tentang program Responden	62
Tabel 4.13 Alasan Pengemudi <i>Online</i> Menjadi Peserta dan Non Peserta	66

DAFTAR GAMBAR

2.1. Surplus Konsumen	28
2.2. Kerangka Penelitian	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Validitas	77
Lampiran 2. Hasil Uji Realibilitas.....	77
Lampiran 3. Hasil Uji Regresi Binary Logistic.....	77
Lampiran 4. Hasil Uji Andrews and Hosmer-Lemeshow	78
Lampiran 5. Kuisisioner.....	79
Lampiran 6. Tabel Data Kuisisioner	85

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah membuat dan mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah ataupun tidak mampu dalam hal finansial. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 terkait Badan Penyelenggara Jaminan **Sosial** (BPJS), jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk masyarakat demi menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang lebih layak

Jaminan sosial di Indonesia terdiri dari lima ruang lingkup program, antara lain; Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kesehatan. Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 6, untuk ruang lingkup program Jaminan Kecelakaan Kerja, Hari Tua, Kematian, dan Pensiun diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk ruang lingkup Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jaminan Kesehatan tersebut bertujuan untuk menjamin peserta dalam hal ini masyarakat Indonesia guna mendapatkan manfaat kesehatan serta perlindungan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Lain halnya dengan Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menjamin perlindungan pokok untuk masyarakat melalui dua strategi atau program asuransi sosial yang terdiri dari Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum dan Asuransi Tanggung Jawab. Kecelakaan ganda merupakan salah satu kecelakaan yang mendapat pertanggung jawaban dari PT. Jasa Raharja.

Tabel 1.1 Perbedaan antara BPJS Kesehatan, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan

Program	Jaminan Kesehatan	Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan yang ditanggung	Kecelakaan Tunggal dan bukan merupakan kecelakaan kerja (contoh : Kecelakaan jatuh karena lubang)	Kecelakaan Ganda (Pengemudi maupun penumpang), pengemudi yang merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih motor tidak ditanggung	Seluruh Kecelakaan kerja
Manfaat yang diterima	Seluruh biaya perawatan sampai dengan sembuh	-Perawatan (maksimal) Rp 20.000.000 -Meninggal Dunia Rp 50.000.000 -Cacat tetap (maksimal) Rp 50.000.000 -Penggantian biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris) Rp 4.000.000	-Seluruh biaya Perawatan dan pengobatan sampai dengan sembuh -Santunan Meninggal Dunia (maksimal 48 kali upah yang dilaporkan) -Biaya pemakaman sebesar 10 juta -Santunan Cacat (maksimal 48 kali upah yang dilaporkan) -Penggantian biaya pengangkutan
Manfaat Tambahan	-Alat bantu dan atau alat ganti	-Penggantian biaya P3K sebesar 1 juta -Penggantian biaya ambulans sebesar 500 ribu	-Rehabilitasi dengan pemberian alat bantu dan atau alat ganti -Santunan beasiswa apabila meninggal dunia/cacat total tetap akibat kecelakaan kerja diberikan untuk 2 orang anak -Penggantian upah apabila sementara tidak dapat bekerja dikarenakan kecelakaan kerja

Sumber : BPJS Kesehatan, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan, 2022

Perusahaan yang didedikasikan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun pekerja tidak resmi. Empat program yang ditawarkan oleh BPJS

Ketenagakerjaan antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Apabila terjadi kecelakaan, BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk membayar biaya pengobatan korban. Menurut Permenaker (2021) kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang dibawa oleh tempat kerja.

Baik BPJS Kesehatan, Jasa Raharja maupun BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang saling bersinergi seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141/PMK.02/2018 tentang koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam pemberian manfaat pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu tenaga kerja menjadi wajib untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja sekalipun sudah memiliki BPJS Kesehatan ataupun terdaftar pada Jasa Raharja.

Berdasarkan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat beberapa perbedaan baik dari segi kelas pelayanan, jumlah manfaat yang diterima serta manfaat tambahan yang diterima. Hal ini menjadikan ojek *online* memiliki preferensi terkait manfaat yang mana yang lebih disukai dari dua lembaga tersebut.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, besaran iuran yang harus dibayarkan yaitu JKK sebesar 1% dari penghasilan yang dilaporkan, dan JKM sebesar Rp 6.800,00. Iuran JKK dan JKM ini berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah, yang berarti tidak berdasarkan oleh ketersediaan tenaga kerja. Oleh sebab itu dalam penelitian ini diharapkan kita dapat mengetahui apakah iuran yang dibayarkan ini sudah sesuai dengan keinginan tenaga kerja untuk membayar (*willingness to pay*) dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Kepesertaan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi empat segmen, yaitu segmen Penerima Upah, Segmen Jasa Konstruksi, Segmen Pekerja Migran Indonesia dan Segmen Bukan Penerima Upah. Segmen penerima upah meliputi pekerja yang bekerja di sektor formal dan menerima upah dari pemberi kerja, Segmen Jasa Konstruksi meliputi pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi, segmen PMI meliputi pekerja yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan untuk segmen Bukan Penerima Upah meliputi pekerja yang bekerja di sektor informal dan tidak menerima upah dari pemberi kerja.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, dan Program Jaminan Hari Tua merupakan tiga program Jaminan Sosial yang dapat dimasukkan ke dalam bagian Pekerja Bukan Penerima Upah. Menurut UU Ketenagakerjaan, pekerja yang bekerja tanpa hubungan kerja merupakan kesepakatan yang mengatur aspek pekerjaan, upah, dan tenaga yang dianggap sebagai pekerja informal, dan termasuk dalam kategori bukan penerima upah.

Tiga segmen yang membentuk Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan adalah anggota Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Penerima Upah (PPU), dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Menurut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, iuran BPJS Kesehatan PBPU kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku sekarang adalah untuk iuran kelas 1 diperkirakan bernilai Rp 150.000,00, iuran kelas 2 diperkirakan bernilai Rp 100.000,00, dan kelas 3 senilai Rp 35.000,00.

Jaminan sosial sektor informal diatur dalam UUD RI Tahun 1945, intinya seperti yang disebutkan pada pasal 28 H ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap masyarakat berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Tabel 1.2 Data Pekerja Sektor Formal, Sektor Informal dan Sektor Informal Terdaftar Jaminan Kecelakaan Kerja di Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2021

Tahun	Sektor Formal (Orang)	Sektor Informal (Orang)	Sektor Informal Terdaftar JKK (Orang)
2017	272.870	165.014	12.917
2018	275.405	192.716	27.226
2019	288.897	186.347	14.818
2020	281.282	224.201	9.743
2021	294.737	215.774	10.385

Sumber : Badan Pusat Statistik dan BPJS Ketenagakerjaan, 2022

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan data pekerja sektor formal, sektor informal dan sektor Informal terdaftar jaminan kecelakaan kerja pada Kota Bandar Lampung , dari data di atas kita dapat melihat bahwa jumlah tenaga kerja informal memiliki proporsi yang hampir sama besar dengan jumlah pekerja sektor formal. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa keikutsertaan sektor informal pada program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah. Pada tahun 2021, terdapat 10.385 (4,8%) dari 215.774 tenaga kerja informal Kota Bandar Lampung yang terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Angka keikutsertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja sektor informal yang kecil ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya kepedulian pekerja informal terhadap perlindungan sosial yang telah diamanatkan oleh Undang Undang.

Jaminan kecelakaan kerja diatur secara nasional berdasarkan asas asuransi sosial, menurut Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peserta program jaminan kecelakaan kerja adalah mereka yang telah membayarkan iuran. Peserta yang mengalami cedera akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa perawatan medis yang disesuaikan dengan kebutuhan medis khusus mereka, serta pembayaran finansial jika terjadi kematian atau cacat tetap total.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi dari risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang dibawa oleh lingkungan tempat kerja. Perawatan kesehatan, kompensasi uang, program bantuan kembali bekerja, kegiatan promosi dan preventif, rehabilitasi, kompensasi beasiswa, dan penggantian kacamata, alat bantu dengar, dan gigi palsu adalah beberapa keuntungan yang ditawarkan. Program asuransi kecelakaan kerja mandiri mensyaratkan 1% dari penghasilan pekerja yang dinyatakan sebagai iuran.

Berdasarkan penelitian oleh Budhi, dkk (2022) biaya kecelakaan lalu lintas untuk luka berat adalah sebesar RP 119.842.000,00 sedangkan biaya kecelakaan lalu lintas untuk luka ringan adalah sebesar Rp 11.902.000,00

Tabel 1.3 Perbandingan Biaya Ketika Mengalami Kecelakaan Kerja Antara Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dengan Non Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja

Biaya Ketika Mengalami Kecelakaan Kerja	Peserta JKK	Non Peserta JKK
Biaya Perawatan RS	Ditanggung sampai dengan sembuh	Rp 500.000/malam
Biaya Operasi (Jika dibutuhkan)	Ditanggung full sesuai kebutuhan medis	Rp 30-100juta
Biaya Kehilangan Penghasilan	Akan diberikan penghasilan selama tidak dapat bekerja dikarenakan kecelakaan	Kehilangan penghasilan
Santunan kematian	48x upah yang dilaporkan	Tidak ada
Beasiswa anak apabila meninggal dunia	Diberikan beasiswa maksimal 2 orang anak	Tidak ada
Biaya alat bantu	Ditanggung oleh BPJSTK	Tidak ada
Santunan uang apabila mengalami cacat total tetap	48x upah yang dilaporkan	Tidak ada

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Tabel 1.3 kita dapat melihat perbandingan biaya yang harus dikeluarkan apabila mengalami kecelakaan kerja antara peserta yang mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan yang tidak mengikuti program JKK. Dengan iuran minimum Rp 10.000,-, pekerja dapat mengurangi resiko sebesar ratusan juta rupiah dan resiko kehilangan penghasilan.

Salah satu indikator saat ini bahwa Indonesia telah memasuki era digital dan memungkinkannya menembus berbagai aspek keberadaannya adalah meningkatnya jumlah pengguna internet. Jumlah pengguna internet meningkat secara signifikan. Menurut perkiraan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), 196,7 juta orang Indonesia akan *online* pada tahun 2021. Keadaan ini mendorong berkembangnya beberapa *platform* dan aplikasi berbasis *smartphone* yang membutuhkan konektivitas internet dari konsumennya. Platform transportasi *online* adalah salah satunya.

Pengemudi *online* saat ini merupakan salah satu pekerjaan sektor informal yang banyak diminati sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Pengemudi *online* sendiri merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, hal ini dikarenakan pekerjaan ini harus menghabiskan sebagian besar waktu di jalanan dan memiliki jam kerja yang tidak menentu. Risiko yang tinggi ini menjadi faktor pendorong bagi pekerja untuk memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pengemudi *online* sendiri terbagi menjadi dua kendaraan yaitu pengemudi *online* yang menggunakan kendaraan mobil dan pengemudi *online* yang menggunakan kendaraan motor.

Tabel 1.4 Data Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Mobil dan Motor
Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Transportasi	
	Mobil	Motor
2017	115	380
2018	108	338
2019	89	243
2020	80	283
2021	65	234

Sumber : Polresta Bandar Lampung, 2022

Berdasarkan Tabel 1.3, pada tahun 2017, kecelakaan mobil berjumlah 115 sedangkan kecelakaan motor berjumlah 380, kemudian pada tahun 2018, kecelakaan mobil berjumlah 108 dan kecelakaan motor berjumlah 338, pada tahun 2019, kecelakaan mobil berjumlah 89 dan kecelakaan motor berjumlah 243, pada tahun 2020, kecelakaan mobil berjumlah 80 dan kecelakaan motor berjumlah 283, pada tahun 2021 kecelakaan mobil berjumlah 65 dan kecelakaan motor berjumlah 234. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas bagi kendaraan motor lebih besar dari kendaraan mobil. Hal ini menunjukkan bahwa motor memiliki risiko kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi daripada mobil.

Jumlah kecelakaan pada Tabel 1.3 hanya merupakan data yang dilaporkan pada Polresta Bandar Lampung, sedangkan kemungkinan besar jumlah kecelakaan lalu lintas pada Kota Bandar Lampung per tahun lebih besar daripada data terlampir dikarenakan banyak kecelakaan lalu lintas yang tidak dilaporkan ke kantor polisi.

Pada Kota Bandar Lampung terdapat beberapa perusahaan transportasi *online* dengan aplikasi. Pada tahun 2017 perusahaan yang pertama masuk ke Provinsi Lampung adalah Go-Jek yang kemudian disusul oleh Grab dan Maxim. Masuknya perusahaan transportasi *online* ini sendiri diiringi dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat untuk dapat menjadi mitra pengemudi yang seharusnya dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.5 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung

Tahun 2015-2021

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka
2014	8.29
2015	8.51
2016	-
2017	8.10
2018	7.27
2019	7.15

2020	8.79
2021	8.85

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung sebesar 8.29%, pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung meningkat menjadi 8.51% kemudian pada tahun 2017 tingkat pengangguran turun menjadi 8.10%. Pada bulan Maret 2017 Gojek pertama kali masuk ke kota Bandar Lampung, pada tahun 2018 tingkat pengangguran turun lumayan signifikan menjadi 7.27% dan pada tahun 2019 tingkat pengangguran turun menjadi 7.15%. Tahun 2020, tingkat pengangguran kembali mengalami peningkatan menjadi 8.79% dimana pada tahun 2020 pandemi covid masuk ke Indonesia yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan melakukan pemutusan hubungan kerja massal, dan pada tahun 2021 tingkat pengangguran kembali mengalami peningkatan dikarenakan pandemic covid yang masih berlangsung sehingga tingkat pengangguran meningkat menjadi 8.85%. Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa masuknya perusahaan transportasi *online* pada tahun 2017 ini memiliki pengaruh dalam menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung.

Perusahaan yang menawarkan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat dikenal sebagai perusahaan aplikasi diatur dalam Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Bagi Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kemanfaatan Masyarakat.

Tabel 1.6 Data Jumlah Mitra Pengemudi *Online* Motor Aktif dan Penghasilan Rata-rata Per hari Pada Go-Jek, Grab dan Maxim

Perusahaan	Jumlah Pengemudi <i>Online</i> Motor Aktif (Orang)	Jumlah Penghasilan Rata-Rata (Rupiah)
Go-Jek	6113	Rp 75.000
GRAB	4056	Rp 75.000
Maxim	5158	Rp 75.000

Sumber : Komunitas GASPOOL (Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek *Online* Lampung), 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.5, jumlah pengemudi *online* motor aktif yang paling besar adalah pada Perusahaan Go-Jek yaitu sebesar 6.113 pengemudi yang aktif, disusul dengan pengemudi Maxim sebesar 5.158 pengemudi yang aktif dan kemudian yang paling kecil adalah GRAB dengan jumlah 4.056 pengemudi yang aktif. Untuk jumlah penghasilan rata-rata kurang lebih sama yaitu sekitar Rp 75.000,- per hari.

Kerjasama antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi didasarkan pada Permenhub No. 12 Tahun 2019 Pasal 15 tentang Perlindungan Keselamatan Bagi Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kemanfaatan Masyarakat. Oleh karena pengemudi *online* tidak bekerja di bawah perusahaan dan tidak mendapatkan upah bulanan yang ditetapkan, status pengemudi adalah 'pekerja informal', seperti yang didefinisikan oleh ketentuan pembagian keuntungan perjanjian kemitraan.

Untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas, kesediaan seseorang untuk membayar dapat didefinisikan sebagai harga tertinggi yang bersedia dibayarkan untuk layanan atau pengiriman (Whitehead, 2005).

Willingness To Pay merupakan keuntungan dari suatu barang atau jasa dan untuk menunjukkan seberapa tinggi mereka menghargai barang atau jasa tersebut (Mankiw, 2006). Jumlah uang yang dihasilkan seseorang secara individual pada bulan tertentu. Pendapatan mempengaruhi kapasitas seseorang untuk konsumsi dan kapasitas untuk pembayaran. Oleh karena itu, memiliki gaji yang besar akan meningkatkan keinginan seseorang untuk membayar. Menurut Hildayanti, dkk. (2021), jika gaji seseorang naik, maka akan lebih mampu membayar premi asuransi kesehatan.

Tingkat Pendidikan merupakan lama Pendidikan yang sudah ditempuh. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pemahaman pentingnya jaminan kecelakaan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Semakin tinggi tingkat Pendidikan yang sudah ditempuh seseorang akan semakin besar juga keinginan seseorang untuk mengikuti program jaminan sosial. Berdasarkan hasil penelitian Emalia, dkk (2016), kepala keluarga dengan tingkat Pendidikan yang

lebih tinggi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *willingness to pay*.

Usia yang semakin tua akan membuat seseorang memiliki pola pikir yang lebih dewasa dan semakin peduli dengan kesehatan dan asuransi. Oleh sebab itu usia yang semakin bertambah akan membuat *willingness to pay* semakin tinggi. Pada penelitian sebelumnya oleh Madya, dkk (2017), kelompok usia >46 tahun akan berpeluang memiliki JKK sebesar 1.10 kali lebih tinggi daripada kelompok usia dibawahnya.

Jenis kelamin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap WTP, menurut Madya, dkk (2017) jenis kelamin laki-laki pada tenaga kerja informal berpeluang menurunkan kepemilikan JKK sebesar 41.9%. Perbedaan jenis kelamin ini juga menunjukkan perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan lebih bersifat berjaga-jaga terhadap resiko.

Pengetahuan mengenai program akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk mendaftarkan diri pada program JKK. Semakin besar pengetahuan maka akan semakin tinggi seseorang mau membayar. Penelitian sebelumnya oleh Hardika, dkk (2020) tentang Analisis Willingness To Pay Terhadap Iuran BPJS Kesehatan Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Semarang menyebutkan bahwa tingkat kualitas pelayanan kesehatan dan pengetahuan mengenai pelayanan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap WTP iuran BPJS Kesehatan.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar kesediaan pengemudi *online* motor di Kota Bandar Lampung untuk membayar keikutsertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (Studi Kasus pada PT. Gojek Indonesia Cabang Kota Bandar Lampung) dan apa saja faktor-faktor yang meningkatkan probabilitas nilai WTP serta bagaimana preferensi ojek *online* terkait manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan pengetahuan mengenai program jaminan kecelakaan kerja akan meningkatkan probabilitas *willingness to pay* pengemudi ojek *online* untuk keikutsertaan Jaminan Kecelakaan Kerja?
2. Berapa nilai rata-rata *Willingness to Pay* pengemudi ojek *online* untuk membayar keikutsertaan Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana perbandingan preferensi ojek *online* terkait manfaat yang diberikan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan pengetahuan terhadap program jaminan kecelakaan kerja dapat meningkatkan probabilitas *willingness to pay* para pengemudi ojek *online* untuk membayar keikutsertaan Jaminan Kecelakaan Kerja.
2. Menghitung nilai rata-rata *Willingness to Pay* pengemudi ojek *online* untuk membayar keikutsertaan Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Mengetahui preferensi ojek *online* terkait manfaat yang diberikan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai informasi untuk pengambilan kebijakan dalam penetapan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan serta dapat mengetahui apa yang diharapkan pengemudi ojek *online* terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja.
2. Bahan sumber informasi dan pengetahuan untuk penelitian sejenisnya dimasa yang akan datang .

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Mengacu pada latar belakang dari penelitian ini, dibutuhkan teori sebagai dasar untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian yaitu mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan menghitung nilai WTP dari Jaminan Kecelakaan Kerja.

2.1.1 Teori Barang Publik

Barang publik merupakan produk yang tidak eksklusif atau patuh pada persaingan ekonomi. Ketersediaan barang publik tidak dibatasi oleh demografi konsumennya, dan jika memungkinkan, akses ke barang tersebut gratis untuk semua. Barang publik adalah barang yang selama digunakan oleh orang tertentu, tidak mempengaruhi konsumsi orang lain terhadap barang tersebut. (Prasetya, 2012). Sifat barang publik yang non-rival dan non-eksklusivitas, timbul masalah-masalah yang mengelilinginya antara lain:

1. Barang publik sering digunakan secara berlebihan.
2. Barang publik tidak dipungut biaya.
3. Orang ragu-ragu untuk menyediakan atau memeliharanya ketika tidak ada pendapatan.
4. Utilitas yang diperoleh setiap keluarga dari barang publik bergantung pada volume penawaran dan tingkat penggunaan.

Terdapat empat teori barang publik menurut para ahli:

a. Teori Pigou

Pigou berpendapat bahwa tingkat di mana barang publik ditawarkan harus sedemikian rupa sehingga kepuasan marjinal mereka sama dengan ketidaksenangan marjinal dengan pajak yang dikenakan untuk mendanai inisiatif pemerintah (menawarkan barang publik). Berdasarkan Mangkoesoebroto (2011) Teori Pigou memiliki kelemahan karena masyarakat memiliki rasa puas yang marjinal dengan barang publik dan rasa tidak bahagia yang marjinal dengan membayar pajak, yang keduanya tidak dapat diukur karena merupakan perasaan ordinal.

b. Teori Bowen

Barang publik, menurut Bowen, adalah barang yang pengecualiannya tidak dapat ditetapkan. Oleh karena itu, jika suatu barang publik ada, tidak ada yang dapat menyangkal keuntungannya, memastikan bahwa setiap orang berhak untuk memanfaatkannya. Menurut Mangkoesoebroto (2011) dikarekan tidak ada pengecualian, penggunaan kurva permintaan dan penawaran teori ini menimbulkan masalah karena konsumen tidak dapat mengungkapkan kebahagiaannya atas keberadaan barang publik tersebut, yang mencegah terbentuknya kurva permintaan.

c. Teori Erick Lindahl

Ada persamaan antara teori Bowen dan teori Lindahl; namun, teori Lindahl mendasarkan setiap pembayaran konsumen pada sebagian kecil dari total biaya pengiriman barang publik daripada harga absolut. Berdasarkan analisis kurva indiferen dengan anggaran terbatas, analisis Lindahl. Cacat dalam teori Lindahl adalah bahwa teori tersebut semata-mata membahas penyediaan komoditas publik, mengabaikan penjualan barang-barang yang dibuat secara pribadi. Selain itu, penggunaan kurva indiferen adalah kelemahan mendasar. Tidak ada yang mau mengungkapkan preferensinya terhadap barang publik karena sifat barang publik tidak mungkin dihilangkan. Teori ini hanya menganalisis penyediaan barang publik tanpa memperkirakan jumlah barang swasta yang semestinya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan yang maksimal.

d. Teori Samuelson

Samuelson berpendapat bahwa keberadaan produk non-eksklusif dan non-rival tidak menghalangi ekonomi untuk mencapai kondisi optimal Pareto atau tingkat kesejahteraan sosial tertinggi. Kelemahan teori ini adalah bahwa temuan analisis sangat bergantung pada tingkat dasar pemilihan kesejahteraan individu serta tingkat kesejahteraan yang dipilih. Gagasan bahwa konsumen secara terbuka mengungkapkan preferensi mereka terhadap barang publik dan bahwa preferensi ini menjadi dasar untuk memungut biaya untuk memproduksi barang publik memiliki kelemahan terbesar. Bagaimana pemerintah mengumpulkan uang dari pengguna barang publik menghadirkan tantangan dalam menentukan jumlah barang publik yang akan dikirimkan.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum yang didirikan pemerintah dengan bertujuan memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat melalui mekanisme asuransi sosial. Produk dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun merupakan barang publik dimana pemerintah menyelenggarakan dengan tujuan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan konsumsinya tidak mengurangi konsumsi individu lain akan barang tersebut.

Sebagai barang publik yang bersifat non-rival dan non-eksklusivitas, iuran dari program BPJS Ketenagakerjaan ditentukan oleh pemerintah, akan tetapi untuk mengetahui berapa besar harga maksimum yang masyarakat bersedia bayarkan untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas dan pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan nilai Willingness to Pay dari Masyarakat.

2.1.2 Penentuan Harga Pelayanan Publik

Dapat diterima jika pemerintah mengenakan biaya untuk beberapa layanan ketika memberikan layanan publik, baik secara langsung atau melalui bisnis milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik, seperti penyediaan air bersih, angkutan umum, BPJS, sarana rekreasi, dan lain-lain dapat dikenakan biaya pelayanan.

Ada banyak pembenaran untuk menagih konsumen untuk layanan publik:

1. Ada produk publik dan swasta.
2. Kelangsungan finansial
3. Prinsip *profit oriented*

Sasaran pemerintah ketika mengadopsi strategi harga seringkali melibatkan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk:

1. Efisiensi pasar yang lebih baik
2. Perbaikan telah dilakukan dalam arus informasi.
3. Monopoli dapat dikurangi
4. Ada batasan tentang bagaimana bisnis baru dapat memasuki pasar.

Besarnya pungutan yang dikenakan kepada masyarakat harus ditentukan oleh pemerintah. Praktik standarnya adalah menghitung biaya pada biaya penuh penyediaan layanan (pemulihan biaya penuh). Meskipun demikian, sulit untuk menentukan seluruh biaya karena (Mardiasmo, 2004):

1. Seluruh biaya penyediaan layanan tidak diketahui secara keseluruhan.
2. Karena biaya untuk melayani satu orang ke orang lain berbeda, sangat sulit untuk memperkirakan berapa banyak yang dikonsumsi.
3. Untuk mencegah subsidi, diperlukan diskriminasi harga atau produk karena pungutan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar.
4. Biaya yang harus diperhatikan, apakah itu biaya modal atau hanya biaya operasional langsung (biaya operasional saat ini). Agar biaya penggantian barang modal yang sudah kadaluarsa dapat dimasukkan, perlu juga memasukkan biaya operasional dan pemeliharaan. Strategi penetapan harga ini dikenal sebagai penetapan harga biaya marjinal.

Terdapat beberapa alternatif dalam menentukan harga (Mardiasmo, 2004) :

- a. Tarif dua bagian: Layanan publik memiliki harga tetap untuk infrastruktur atau biaya overhead dan variabel untuk jumlah penggunaan.
- b. Biaya beban puncak: Tarif tertinggi digunakan untuk menentukan berapa biaya layanan publik.

- c. Diskriminasi harga: Menawarkan variasi harga berdasarkan berbagai kemungkinan pendapatan
- d. Pemulihan biaya lengkap Harga untuk layanan ditentukan oleh seluruh biaya atau keseluruhan biaya penyediaan layanan.
- e. Penetapan harga di atas biaya marjinal

2.1.3 Pelayanan Publik

Segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan persyaratan hukum dianggap sebagai pelayanan publik (Mahmudi, 2010).

Merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan pelayanan yang disebut sebagai pelayanan publik. Namun, bukan berarti pemerintah harus melakukannya sendiri; negara bebas untuk bekerja dengan organisasi non-pemerintah untuk merencanakan layanan publik. Untuk menjamin setiap orang memiliki akses ke layanan ini, negara dapat menawarkan dana atau subsidi selama proses ini (Dwiyanto, 2017).

Standar pelayanan merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menjamin keadilan dalam penyediaan pelayanan publik. Standar pelayanan adalah persyaratan yang harus dipatuhi oleh pemberi dan/atau penerima pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan merupakan konsep pelayanan publik. Tersedia layanan pelanggan (komunitas) yang luar biasa. Kualitas layanan yang luar biasa meliputi hal-hal berikut:

- a. Keramahan
- b. Kredibilitas
- c. Akses
- d. Penampilan fasilitas
- e. Kemampuan dalam menyajikan pelayanan

Prinsip Pelayanan Publik didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- a. Transparansi. Setiap orang yang membutuhkannya memiliki akses ke sana, dan itu disampaikan secara terbuka dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti.
- b. Akuntabilitas. dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi persyaratan hukum
- c. Bersyarat: menghormati prinsip efektivitas dan efisiensi dengan tetap konsisten dengan kebutuhan dan kemampuan penyedia dan penerima layanan.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan, harapan, dan ambisi mereka.
- e. Persamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti membedakan berdasarkan ras, suku, atau status ekonomi.
- f. Hak dan kewajiban harus seimbang. Baik yang memberikan maupun menerima pelayanan publik harus menjunjung tinggi hak dan kewajibannya masing-masing.

Beberapa alasan pemerintah memperhatikan pelayanan publik adalah sebagai berikut (Wasistiono, 2009):

- a. Meskipun peningkatan efisiensi dan kualitas tidak dapat dicapai tanpa persaingan, instansi pemerintah pada umumnya terlibat dalam kegiatan monopolistik. Akibatnya, tidak ada lingkungan yang kondusif bagi persaingan di dalam organisasi-organisasi tersebut.
- b. Pegawai pemerintah memprioritaskan pelaksanaan wewenang atas pemenuhan keinginan konsumen atau penyediaan layanan saat menjalankan tugasnya.
- c. Tidak ada akuntabilitas vertikal ke atas, ke samping, atau ke bawah.
- d. Anggota masyarakat sering mengabaikan hak dan tanggung jawab mereka karena mereka tidak menyadarinya, terutama karena layanan tersebut ditawarkan tanpa biaya.

Menurut Rianti *et al.*, (2019) untuk menyediakan segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, orang, proses, lingkungan, dan keinginan konsumen dalam bentuk barang dan jasa yang diantisipasi untuk memenuhi harapan dan kepuasan

masyarakat. Secara umum, kualitas layanan harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen

Berikut indikator kualitas pelayanan yang dianggap oleh masyarakat umum (Moenir, 2010):

- a. Kehandalan, atau kapasitas untuk memberikan layanan tepat seperti yang diperlukan.
- b. Jaminan, yaitu kapasitas untuk persuasi dan pengetahuan.
- c. Empati, yaitu tingkat pertimbangan dan fokus pribadi pada klien.
- d. Daya tanggap, atau kapasitas untuk membantu klien dalam memberikan layanan terbaik
- e. Nyata, yaitu, memiliki akses ke sumber daya aktual seperti peralatan dan fasilitas, serta terlihat baik.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang mengatur tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, tingkat kepuasan penerima pelayanan menjadi tolok ukur penilaian efektivitas penyelenggaraan pelayanan. Ketika layanan diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan, penerima layanan merasa puas. Oleh karena itu, survei indeks kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala oleh masing-masing penyedia layanan.

Sarana untuk melayani publik melalui penggunaan prinsip dan aturan atau standar moral yang baik adalah melalui praktik etika pelayanan publik. Apakah pegawai negeri telah bertindak sesuai etika dalam penilaian dan tindakan mereka adalah perhatian utama dari etika pelayanan publik. Tindakan berikut diperlukan untuk mencapai integritas dalam pelayanan publik (Sawir, 2020):

- a. Perilaku pegawai publik harus konsisten dengan komitmen organisasi terhadap pelayanan publik.
- b. Pelayanan publik dilaksanakan dengan cara yang dapat diandalkan, dan warga negara diperlakukan “tanpa pandang bulu” sesuai dengan aturan keadilan dan hukum.
- c. Sumber daya digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai rencana

- d. Publik memiliki akses ke alat untuk mengajukan pertanyaan dan menawarkan masukan, dan proses pengambilan keputusan transparan bagi mereka.

Performa luar biasa ditentukan oleh dan dituntut oleh dua faktor utama:

1. Efisiensi, produktivitas, dan efektivitas adalah contoh keunggulan teknis (profesionalisme).
2. Unggul dalam moralitas atau etika, termasuk kejujuran, keadilan, objektivitas, dan kebajikan lainnya.

Pengabdian masyarakat menunjukkan bagaimana seorang pegawai pemerintah memandang posisinya secara holistik. Ketika suatu lembaga memberikan pelayanan atau komoditas, inti dari pengabdian masyarakat adalah sikap saling mendukung, ramah, dan profesionalisme yang memuaskan masyarakat dan mendorong individu untuk menghubungi kembali organisasi tersebut untuk mendapatkan bantuan (Sawir, 2020).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap peserta.

Penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pelayanan publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, apabila dilakukan satu atau beberapa tindakan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk. Oleh karena itu, menjadi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan administrasi, layanan, dan informasi kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan haknya terkait dengan persyaratan dasar jaminan sosial.

Pada BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan publik yang dilakukan adalah memberikan pelayanan PRIMA (Peduli, Ringkas, Interaktif, Modern, Aktif) dalam pendaftaran kepesertaan, pencetakan kartu peserta, pemberian informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan dan pelayanan klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu usaha peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan ikut serta dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mall Pelayanan Publik.

2.1.4 Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, terutama perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menagih premi dengan imbalan:

1. Mengganti kerugian tertanggung atau pemegang polis untuk setiap kerugian, kerusakan, pengeluaran, kehilangan keuntungan, atau kewajiban hukum kepada pihak ketiga yang dapat mereka pertahankan sebagai akibat dari kejadian yang tidak dapat diprediksi
2. Memberikan perlindungan kepada tertanggung atau pemegang polis dari kerugian finansial.

Tujuan, manfaat dan jenis-jenis asuransi adalah sebagai berikut (Ronaldo,2018):

Tujuan Asuransi:

1. Untuk memastikan perlindungan dari risiko kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat umum atau pemegang polis tertentu.
2. Tidak perlu mengganti atau membayar kerugian yang timbul dengan jumlah yang seringkali tidak terduga karena cukup membayar sejumlah biaya premi untuk memastikan pemerataan biaya.
3. Ketika konsumen menerima klaim, nilai tabungan akan jauh lebih besar daripada jumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung pada awalnya. Ini terutama berlaku untuk asuransi jiwa.
4. Memulihkan potensi penghasilan seseorang atau perusahaan yang hilang jika pendapatan yang direncanakan hilang atau tidak berhasil.

Manfaat Asuransi:

1. Asuransi memberikan rasa aman
2. Asuransi mengendalikan kerugian
3. Asuransi sebagai dana investasi

Jenis-jenis Asuransi:

1. Asuransi yang lebih luas

Menjamin terhadap risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga adalah yang dilakukan oleh asuransi umum terhadap tertanggung atau peserta asuransi.

2. Asuransi Jiwa

Tujuan asuransi jiwa adalah memberikan kompensasi finansial kepada nasabah yang menanggung risiko kematian sebagaimana ditentukan dalam kontrak asuransi.

3. Reasuransi

Reasuransi, terkadang dikenal sebagai asuransi untuk perusahaan asuransi, adalah asuransi yang mengambil risiko dari perusahaan asuransi.

4. Asuransi yang diperlukan (Asuransi Sosial)

Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan asuransi wajib khusus untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Asuransi sosial adalah sistem penghimpunan dana melalui iuran yang diwajibkan untuk memberikan perlindungan atas bahaya sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau keluarganya, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sebagian besar waktu, asuransi sosial diperlukan, didukung oleh kontribusi karyawan, dikendalikan oleh organisasi nirlaba, dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Beberapa asuransi sosial yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (TASPEN)
2. Asuransi Sosial ABRI
3. BPJS Kesehatan
4. BPJS Ketenagakerjaan
5. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja

2.1.5 Sistem Jaminan Sosial Nasional

Untuk seluruh penduduk Indonesia, negara menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), setiap orang berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, hidup secara terhormat, dan terangkat harkatnya menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Pasal 18 Undang-Undang 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja.

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 Pasal 4, SJSN diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

1. Gotong royong

Gagasan gotong royong yang diwujudkan dengan kewajiban masing-masing peserta untuk membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya, menyatukan seluruh peserta dalam memikul biaya jaminan sosial.

2. Nirlaba

Nirlaba adalah pendekatan manajemen bisnis yang menekankan pada penggunaan pendapatan pengembangan dana untuk memberi manfaat bagi semua peserta sebanyak mungkin.

3. Keterbukaan

Gagasan transparansi adalah untuk memudahkan setiap anggota memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami.

4. Konsep berjaga-jaga

Kehati-hatian adalah ide di balik pengelolaan uang yang hati-hati, komprehensif, aman, dan terorganisir.

5. Tanggung jawab

Konsep akuntabilitas merupakan landasan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang tepat dan bertanggung jawab.

6. Portabilitas

Gagasan portabilitas adalah tetap memberikan jaminan meskipun peserta berpindah tempat dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pindah pekerjaan atau tempat tinggal.

7. Partisipasi Wajib

Sesuai dengan gagasan kepesertaan wajib, semua penduduk pada akhirnya harus mendaftarkan diri dalam jaminan sosial.

8. Dana Amanat

BPJS adalah sarana tempat pembayaran peserta dan hasil pertumbuhannya ditempatkan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

Sebagian besar pendapatan dari pengelolaan Dana Jaminan Sosial dikembalikan kepada pemegang saham sebagai dividen untuk kepentingan peserta Jamsostek, dan digunakan khusus untuk pengembangan program-program baru.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui pembayaran wajib pekerja, telah tersedia.

Tanggung jawab pengelolaan program jaminan sosial berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan sesuai dengan undang-undang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari dua badan yang berbeda yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang membidangi program jaminan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang membidangi program jaminan pensiun dan ketenagakerjaan. -terkait kecelakaan, kematian, dan jaminan hari tua.

2.1.6 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial, sebagaimana tercantum

dalam UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibagi menjadi dua bagian: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang tertuang dalam Pasal 1 Pasal 7.

Berikut program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (2) huruf b:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Ketika peserta menderita penyakit atau kecelakaan kerja, manfaat diberikan dalam bentuk uang dan/atau layanan kesehatan.

b. Jaminan Kematian

Ketika seorang peserta meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan pembayaran uang yang tidak disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan kerja.

c. Jaminan hari Tua

Pengamanan yang disiapkan untuk menjamin peserta mendapatkan uang saat mencapai usia pensiun, cacat total permanen, atau meninggal dunia.

d. Jaminan Pensiun

program jaring pengaman yang dibentuk untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang terhormat bagi orang-orang yang kehilangan atau penghasilannya berkurang karena usia pensiun atau cacat tetap total.

Berdasarkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi empat:

1. Penerima Upah Peserta

Setiap karyawan pemberi kerja dibayar gaji atau jenis pembayaran lainnya.

2. Peserta yang tidak dibayar

Peserta yang secara mandiri melakukan operasi perusahaan untuk menghasilkan uang.

3. Peserta jasa konstruksi

Siapapun yang dibayar untuk melakukan pekerjaan untuk proyek Jasa Konstruksi

4. TKI dari Indonesia

Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang melakukan, atau telah melakukan pekerjaan dengan bayaran di luar wilayah negara Republik Indonesia.

2.1.7 Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015, peserta dapat memperoleh manfaat berupa uang dan/atau pelayanan kesehatan jika mengalami sakit atau cedera akibat kerja.

Individu yang secara mandiri melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan dianggap sebagai peserta yang tidak menerima upah. Permenaker 5 Tahun 2021. Apabila terjadi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, peserta Asuransi Kecelakaan Kerja berhak mendapatkan manfaat sebagai berikut:

Bergantung pada persyaratan medis, layanan kesehatan mungkin termasuk:

1. Pelayanan Kesehatan :

- a) Tes dasar dan tambahan;
- b) Perhatian medis tingkat pertama dan tertinggi;
- c) Rawat inap Kelas I di rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang sebanding;
- d) Terapi intensif
- e) Bantuan diagnostik;
- f) Penyakit penyerta dan konsekuensi yang terkait dengan penyakit dan kecelakaan akibat kerja dikelola;
- g) Layanan unik;
- h) Implan dan gadget medis;
- i) Layanan medis/dokter;
- j) Operasi;
- k) Donor darah;
- l) Pemulihan dari pengobatan;

2. Santunan Berupa uang

- a) Penggantian biaya transportasi dengan rincian :

-Transportasi darat, sungai atau danau maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima

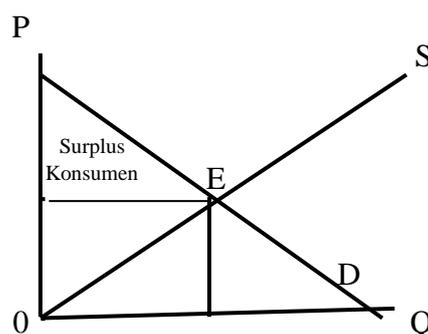
- juta rupiah);
- Transportasi laut maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Transportasi udara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00; dan
- b) Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut:
- 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah.
- c) Santunan Cacat, meliputi :
- Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan;
 - Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan;
 - Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan.
- d). Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan,
- Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00.
 - Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- d) Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitas medik.
- e) Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f) Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- g) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- h) Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

2.1.8 *Willingness to Pay (WTP)*

Untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas, *willingness to pay* dapat didefinisikan sebagai harga tertinggi yang bersedia mereka bayar untuk layanan atau pengiriman (Whitehead, 2005).

Harga maksimum yang bersedia dibayar pembeli untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dan untuk menunjukkan seberapa tinggi mereka menghargai barang atau jasa tersebut (Mankiw, 2006).

Pada grafik, WTP adalah ruang di bawah kurva permintaan. Ketika hasil perhitungan WTP dibagi dengan jumlah kontribusi peserta, surplus konsumen tercipta (Kamal, 2014). Penempatan WTP pada kelebihan konsumen ditunjukkan pada diagram berikut.



Gambar 2.1 Surplus Konsumen

Keterangan :

$0Q_E P = \text{willingness to pay}$

$P_E P = \text{surplus konsumen}$

$0E P = \text{surplus produsen}$

2.1.9 *Contingent Valuation Method (CVM)*

Salah satu teknik penilaian ekonomi adalah CVM, yang dapat menentukan nilai ekonomi suatu barang yang tidak diperdagangkan di pasar terbuka. Ketika mengevaluasi produk dengan fokus pada preferensi individu dan nilai standar untuk uang, CVM menggunakan teknik langsung yang pada dasarnya menanyakan kesediaan membayar (WTP) publik (Hanley dan Splash, 1993).

(Barton, 1994) menegaskan bahwa CVM digunakan ketika konsumen tidak memiliki preferensi untuk barang yang langsung dipertukarkan di pasar. Pendekatan CVM menggunakan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi tentang apa yang bersedia dibayar masyarakat (WTP) sebagai imbalan ganti rugi (WTA).

Semua komoditas yang tidak dapat dipasarkan dapat diperkirakan nilai ekonominya dengan menggunakan metode ini. Dengan demikian, gagasan WTP dapat digunakan untuk menghitung nilai ekonomis suatu aset publik. Tujuan CVM adalah untuk menentukan nilai produk yang mendekati nilai sebenarnya jika ada pasar untuk itu. Pendekatan CVM dapat dikonseptualisasikan dalam dua cara, yang pertama adalah penggunaan metode eksperimen. Metode ini menggunakan simulasi atau permainan interaktif. Memanfaatkan metode survei adalah strategi kedua (Manurung, 2008). Dalam implementasi analisis CVP, ada enam langkah menurut Hanley dan Splash (1993):

1. Membangun Pasar Hipotetis (Menyiapkan Pasar Hipotetis)

Pasar hipotetik ini dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang terjadi serta untuk memberikan gambaran tentang perbaikan yang ditawarkan dengan berkontribusi pada perbaikan tersebut.

2. Mendapatkan Nilai WTP (Obtaining Bids).

Jumlah WTP ditawarkan dengan menggunakan metode permainan penawaran. Keuntungan dari permainan penawaran dalam mendapatkan nilai WTP adalah membantu responden mempertimbangkan preferensi mereka dengan hati-hati.

3. Menghitung Estimasi Nilai Mean WTP

Menghitung nilai rata-rata WTP didasarkan pada nilai mean (rata-rata) dan median (tengah). Estimasi WTP rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus:

$$EWTP = \frac{\sum_{i=1}^n Wi}{n}$$

Sumber: Indramawan, 2014

Dimana:

EWTP = Dugaan Nilai Rata-rata WTP

W_i = Nilai WTP ke- i

n = Jumlah Responden

i = Responden ke- i yang bersedia membayar ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

4. Menjumlahkan Data (*Aggregating Data*)

Penjumlahan data merupakan proses dimana nilai rata – rata WTP dikonversikan terhadap total populasi yang dimaksud. Rumus menjumlahkan data adalah :

$$TWTP = EWTP \times N_i$$

Dimana:

TWTP = Total WTP

EWTP = Rata-rata WTP

N_i = Jumlah Populasi

2.2 Penelitian Terdahulu

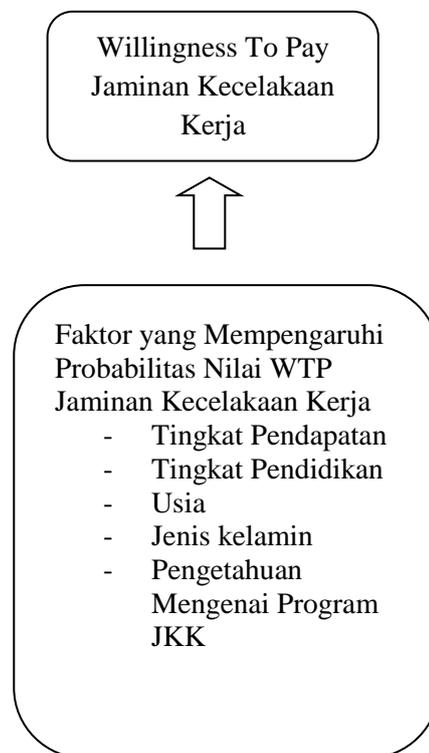
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
Sri Denti on Madya,dkk (2019)	Determinan Sosial Ekonomi Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Tenaga Kerja Informal di Indonesia: Analisis Data SUSENAS 2017	<ul style="list-style-type: none"> ● Umur ● Jenis Kelamin ● Status Pernikahan ● Keluhan Kesehatan ● Pendidikan ● Wilayah ● Sosial Ekonomi/Pendapatan 	Uji regresi logistik, metode maksimum likelihood dengan metode logit	Wilayah, usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, dan posisi sosial ekonomi serta pendapatan pekerja informal semuanya berdampak pada siapa yang memiliki asuransi kecelakaan kerja di Indonesia.
Maya Andita Aryani,dkk (2013)	Determinan <i>Willingness to pay</i> (WTP) Iuran BPJS Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Usia ● Jumlah Anggota Keluarga 	Contingent Valuation Method (CVM)	WTP dipengaruhi secara negatif oleh variabel usia, dipengaruhi secara positif oleh variabel pendidikan terakhir, dipengaruhi secara positif oleh variabel tingkat

		<ul style="list-style-type: none"> ● Pendidikan terakhir yang ditempuh ● Tingkat penghasilan ● Asumsi masyarakat mengenai sistem Syariah 		pendapatan, tidak dipengaruhi oleh variabel jumlah anggota keluarga, dan dipengaruhi secara negatif oleh variabel Syariah. Nilai wtp rata-rata BPJS Kesehatan kelas III adalah Rp 26.875.
Sunarto, dkk (2014)	Estimasi WTP Pekerja Konstruksi Gedung Membayar Premi Asuransi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Faktor yang mempengaruhinya	<ul style="list-style-type: none"> ● Lama Proyek ● Usia ● Status Responden 	Contingent Valuation Method (CVM)	Lama proyek adalah satu-satunya variabel yang signifikan pada level 0,05 WTP berkisar antara Rp 57.552 dan Rp 61.970
Resti Oktora, dkk (2017)	<i>Willingness to pay for National Health Insurance Among Motorcycle Taxi Driver in Depok City, Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan ● Usia ● Pengetahuan tentang Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional 	Contingent Valuation Method (CVM)	Pendapatan, Usia dan Pengetahuan tentang manfaat jaminan Kesehatan nasional berpengaruh terhadap WTP Jaminan Kesehatan Nasional. WTP untuk Jaminan Kesehatan kelas III sebesar Rp 19.364, kelas II sebesar Rp 27.439 dan kelas I sebesar Rp 37.159
Andre Hajek, et al (2020)	<i>Determinants of Willingness to pay for Health Insurance in Germany-Results of the Population-Based Health Study of the Leipzig Research Centre for Civilization Diseases</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Usia ● Pendapatan ● Dukungan Sosial ● Pengalaman ● Keramahan ● Kehatihan 	Contingent Valuation Method (CVM)	WTP dari health insurance adalah 240 euro. Variabel usia, pendapatan, dukungan sosial dan pengalaman berpengaruh terhadap WTP. Variabel keramahan dan kehati-hatian tidak berpengaruh terhadap WTP.

Emily Gustafsson-Wright, et al (2009)	<i>Willingness to pay for Health Insurance</i> : An analysis of the potential market for new low-cost health insurance products in Namibia	<ul style="list-style-type: none"> ● Usia ● Jenis Kelamin ● Pendapatan ● Pendidikan terakhir yang diselesaikan 	Double Bounded Contingent Valuation	Didapatkan WTP untuk new low-cost health insurance adalah 48 NAD
---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--

2.3. Kerangka Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

1. Diduga peningkatan tingkat pendapatan meningkatkan probabilitas terhadap *Willingness to pay* (WTP) Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Diduga semakin tinggi tingkat pendidikan meningkatkan probabilitas terhadap *Willingness to pay* (WTP) Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Diduga semakin tinggi usia meningkatkan probabilitas terhadap *Willingness to pay* (WTP) Jaminan Kecelakaan Kerja
4. Diduga jenis kelamin wanita memiliki probabilitas lebih tinggi terhadap *Willingness to pay* (WTP) Jaminan Kecelakaan Kerja
5. Diduga semakin tinggi tingkat pengetahuan mengenai program Jaminan Kecelakaan Kerja meningkatkan probabilitas terhadap *Willingness to pay* (WTP) Jaminan Kecelakaan Kerja
6. Diduga pendapatan, usia, pendidikan, jenis kelamin dan pengetahuan terhadap program jaminan kecelakaan kerja secara bersama-sama meningkatkan probabilitas terhadap *Willingness to pay* (WTP) Jaminan Kecelakaan Kerja

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Pada metodologi penelitian ini, kita akan melihat bagaimana menjawab tujuan penelitian dengan sebelumnya menjelaskan analisis, variabel penelitian dan cara menjawab bagaimana pengaruh tingkat pendapatan per bulan, tingkat Pendidikan, usia, jenis kelamin dan pengetahuan tentang program JKK terhadap nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja dan untuk menjawab berapa nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja.

Data primer merupakan data digunakan dalam penyelidikan ini. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Wawancara dilakukan dan kuesioner diisi oleh responden pengemudi ojek *online* di kota Bandar Lampung sebagai bagian dari strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 *Willingness To Pay (WTP)*

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesiediaan untuk membayar (WTP) Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pengemudi *online* motor. Dalam penelitian ini, untuk menentukan WTP akan digunakan metode *bidding game* dimana akan ditawarkan beberapa bilangan yang disarankan kepada responden dengan melalui wawancara. Kesiediaan membayar merupakan nilai kategori 0-1, dimana nilai 0 berarti “tidak bersedia” dan nilai 1 berarti “bersedia”.

3.2.2 Pendapatan (I)

Pendapatan per bulan adalah pendapatan/penghasilan yang diterima oleh sampel dalam satu bulan dengan satuan Rupiah (Rp).

3.2.3 Pendidikan (Edu)

Tingkat pendidikan dapat digunakan untuk menentukan variabel pendidikan. Variabel ini menggunakan variabel dummy, dimana : 1= Tidak Lulus SD; 2 = Lulus SD; 3 = Lulus SMP; 4 = Lulus SMA; 5 = Lulus Perguruan Tinggi)

3.2.4 Usia (U)

Variabel usia dilihat dari usia sampel saat ini. Variabel dihitung dalam satuan tahun.

3.2.5 Jenis Kelamin (G)

Variabel jenis kelamin adalah jenis kelamin sampel, dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu laki-laki (1) dan perempuan (0).

3.2.6 Pengetahuan tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja (PMP)

Variabel pengetahuan tentang program JKK ini merupakan ukuran tingkat pemahaman sampel terkait program Jaminan Kecelakaan Kerja, Manfaat yang diterima, Iuran yang dibayarkan dan Peraturan terkait JKK. Variabel menggunakan variabel Dummy, di mana :

1 = Tidak Mengetahui; 2 = Kurang Mengetahui; 3 = Mengetahui; 4 = Sangat Mengetahui

3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Nazir (2009), populasi adalah area generalisasi total yang terdiri dari item dan subjek dengan atribut dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah para pengendara Go-Jek di Kota Bandar Lampung sebanyak 100 orang.

3.4 Teknik Sampel

Sasaran pengambilan sampel digunakan untuk mengidentifikasi kualitas dan atribut yang diinginkan dari suatu populasi dengan hanya mengambil sampel dari populasi tersebut. Sampel yang representatif dari suatu populasi dapat diperoleh dengan menggunakan teknik sampling (Nazir, 2009).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling*. Peneliti memilih sampel berdasarkan sampel yang mereka yakini paling relevan, tepat, dan mewakili populasi. Purposive sampling dalam penelitian ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pengemudi ojek *online* Go-Jek di Bandar Lampung
2. Masa kerja minimal 1 tahun
3. *Full* bekerja sebagai ojek *online*
4. Pengemudi ojek *online* laki-laki 50 orang; Pengemudi ojek *online* perempuan 50 orang

Tabel 3.1 Kriteria Sampel

Kriteria	Sampel
Pendapatan	0 sampai tidak terbatas
Usia	17-60 tahun
Pendidikan	Semua tingkat Pendidikan
Jenis Kelamin	Laki-laki 50%; Perempuan 50%
Jumlah Anggota Keluarga	0 sampai tidak terbatas
Pekerjaan	Ojek <i>Online</i> Mitra Gojek Bandar Lampung
Status Kepesertaan JKK	Terdaftar dan tidak terdaftar

Untuk menentukan jumlah sampel digunakan Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} n = \frac{6113}{6113(0,1)^2 + 1} = 98,39 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Sumber: Widayat dan Amirullah, 2007

Dimana:

n = Jumlah Sampel

$N = \text{Populasi}$

$d^2 = \text{Tingkat Kesalahan } 10\% = 0,1$

3.5 Metode Analisis

Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif adalah proses menafsirkan hasil pengolahan data dengan memberikan rincian dan justifikasi. Analisis deskriptif digunakan untuk melakukan analisis kualitatif. Analisis menggunakan angka, perhitungan statistik, dan berbagai teknik analisis disebut sebagai analisis kuantitatif. Variabel yang mempengaruhi probabilitas nilai WTP kecelakaan kerja pengemudi (*Go-Jek*) *online* di Kota Bandar Lampung diidentifikasi melalui analisis kuantitatif.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menampilkan rata-rata kumpulan data, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, total, rentang, kurtosis, dan kemiringan. Menurut Ghozali (2007), tindakan mengubah data penelitian ke dalam bentuk tabel untuk membantu pemahaman adalah inti dari statistik deskriptif dalam penelitian.

3.5.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner (Ghozali, 2007). Ketika pertanyaan-pertanyaan survei dapat menjelaskan pokok bahasan yang akan diukur, survei tersebut dikatakan sah. Ada dua metode untuk menentukan apakah kuisisioner telah dianggap valid:

1. Apabila $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$
2. Nilai signifikansi < 0.05

Menurut Ghozali (2009), reliabilitas adalah suatu metode pengukuran suatu kuisisioner yang berfungsi sebagai indikasi suatu variabel atau konstruk. Tes ini dirancang untuk menentukan apakah instrumen yang digunakan dapat mengukur dengan benar. Jika seseorang secara konsisten atau mantap menanggapi pertanyaan

pada kuesioner, itu dianggap akurat. Jika nilai Cronbach Alpha suatu kuesioner lebih dari 0,60 maka dianggap dapat dipercaya atau akurat (Ghozali, 2007).

Uji validitas dan realibilitas dilakukan pada 30 orang pengemudi ojek *online* (responden) untuk mengetahui apakah kuisisioner dapat dilanjutkan.

3.5.3 Metode Analisis *Contingent Valuation Model* (CVM)

Metode analisis CVM digunakan untuk menjawab tujuan kedua yaitu nilai WTP. Metode Hanley dan Splash (1993) digunakan untuk CVM dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Membangun Pasar Hipotetis (*Setting up The Hypothetical Market*)

Dalam tahapan ini, dilakukan studi pustaka dan observasi lapangan seperti memberikan informasi terkait Jaminan Kecelakaan Kerja, melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner.

2. Mendapatkan nilai WTP (*Obtaining Bids*)

Pendekatan permainan penawaran memberi responden berbagai kemungkinan tawaran. Menurut perspektif masing-masing, responden dapat memilih opsi yang ditawarkan. Rahasiannya adalah dengan melakukan wawancara dan menyebarkan kuisisioner yang mengajukan pertanyaan yang menghasilkan nilai WTP tertinggi yang dibayarkan.

Tabel 3.2 *Bidding Game*

Bersedia/Tidak	<i>Bidding</i> Iuran	Manfaat
	Rp 5.000,-	-Kelas perawatan yang didapat adalah kelas 3
	Rp 10.000,-	-Manfaat santunan berkala naik menjadi Rp 15.000.000,-
	Rp 15.000,-	-Manfaat santunan berkala naik menjadi Rp 15.000.000,- -Penggantian biaya transportasi darat naik menjadi Rp 7.000.000,-
	Rp 20.000,-	-Manfaat santunan berkala naik menjadi Rp 15.000.000,- -Penggantian biaya transportasi darat naik menjadi Rp 7.000.000,-

	-Santunan biaya pemakaman naik menjadi Rp 15.000.000,-
Dst	Dst

3. Menghitung nilai rata-rata WTP

Menghitung nilai rata-rata WTP didasarkan pada nilai mean (rata-rata) dan nilai median (nilai tengah). Dugaan rata-rata WTP dihitung menggunakan rumus :

$$EWTP = \frac{\sum_{i=1}^n \Sigma Wi}{n}$$

Sumber: Indramawan, 2014

Dimana:

EWTP = Dugaan Nilai Rata-rata WTP

W_i = Nilai WTP ke- i

n = Jumlah Responden

i = Responden ke- I yang bersedia membayar ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

4. Menjumlahkan data

Penjumlahan data merupakan proses dimana nilai rata – rata WTP dikonversikan terhadap total populasi yang dimaksud. Rumus menjumlahkan data adalah :

$$TWTP = EWTP \times Ni$$

Dimana:

TWTP = Total WTP

EWTP = Rata-rata WTP

Ni = Jumlah Populasi

3.5.4 Analisis Regresi *Binary Logistic*

Regresi *logistic* bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat (*dependent*) dapat diprediksi dengan variabel bebas (*independent*). Model Regresi *Binary Logistic* merupakan model regresi dengan variabel dependen yang merupakan variabel *dummy* yang tujuannya untuk memprediksi terjadinya suatu peristiwa atau *event*. Model ini diturunkan dari suatu kondisi dimana probabilitas terjadinya itu tidak akan keluar dari nilai 1 dan 0.

Persamaan regresi model logit diperoleh dari penurunan persamaan probabilitas dari kategori-kategori yang akan diestimasi. Persamaan regresi logistik dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$L_i = \ln \left[\frac{P_i}{1 - P_i} \right] = Z_i$$

Sumber : Gujarati, 2012

Dimana :

L_i = Model Logit dari WTP

$\left[\frac{P_i}{1 - P_i} \right] = e^{Z_i} = Odds Ratio$ (Rasio Peluang)

Adapun spesifikasi model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$WTP = \beta_0 + \beta_1 I + \beta_2 EDU + \beta_3 U + \beta_4 G + \beta_5 PMP$$

Dimana:

WTP = *Willingness to pay*

β = Parameter

I = Pendapatan per Bulan (Rp)

EDU = Pendidikan

U = Usia (Tahun)

G = *Gender/Jenis Kelamin*

PMP = Pengetahuan tentang program JKK

3.5.5 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* yang menguji hipotesis nol apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). (Ghozali,2007). Tingkat signifikan dalam pengujian ini adalah sebesar 5%. Kriteria dalam pengujian ini adalah :

- H_0 diterima apabila : $H_0 \geq \alpha$, model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

- H_0 ditolak apabila : $H_0 \leq \alpha$, terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.

3.5.6 Uji Hipotesis Statistik

Berdasarkan evaluasi statistik, seperti uji regresi parsial (uji z) dan uji signifikansi parameter keseluruhan (uji LR), dapat diketahui parameter yang perlu diestimasi.

a. Pengujian Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Secara Simultan (Uji – LR)

Uji LR digunakan untuk menguji kelayakan model yaitu melihat pengaruh variabel bebas (I, EDU, U, G, dan PMP) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat WTP (Widarjono, 2018). Nilai statistik LR mengikuti distribusi *chi square* (X^2) dengan derajat kebebasan (df) = k - 1 dan tingkat kepercayaan 95% (0,05) digunakan dalam pengujian ini. Perumusannya sebagai berikut:

Uji LR digunakan untuk menguji kelayakan model yaitu melihat pengaruh variabel bebas (I, EDU, U, G, dan PMP) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat WTP (Widarjono, 2018). Nilai statistik LR mengikuti distribusi *chi square* (X^2) dengan derajat kebebasan (df) = k - 1 dan tingkat kepercayaan 95% (0,05) digunakan dalam pengujian ini. Perumusannya sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = 0 \rightarrow$ variabel bebas (pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan pengetahuan terhadap program jaminan kecelakaan kerja) secara simultan tidak meningkatkan probabilitas variabel terikat (WTP)

$H_a: \beta_1 \neq 0 \rightarrow$ variabel bebas (pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan pengetahuan terhadap program jaminan kecelakaan kerja) secara simultan meningkatkan probabilitas variabel terikat (WTP).

Kriteria Pengujian :

Kriteria Pengujian :

- a. H_0 diterima apabila : $LR \text{ stat} < X^2$, artinya variabel bebas (pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan pengetahuan terhadap program jaminan

kecelakaan kerja) secara simultan tidak meningkatkan probabilitas variabel terikat (WTP).

- b. H_0 ditolak apabila : $LR \text{ stat} > X^2$, artinya variabel bebas (pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan pengetahuan terhadap program jaminan kecelakaan kerja) secara simultan meningkatkan probabilitas variabel terikat (WTP).

b. Pengujian Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Secara Parsial (Uji – Z)

Pengujian pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji- z dengan pengujian pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$).

Perumusan hipotesis :

- $H_0 = \beta_i = 0$, Artinya, variabel bebas secara parsial tidak meningkatkan probabilitas variabel terikat.
- $H_a = \beta_i > 0$, Artinya, variabel bebas secara parsial meningkatkan probabilitas variabel terikat.

Kriteria penilaian :

1. $H_0 (I) = \beta_1 = 0$; Peningkatan Pendapatan (I) tidak meningkatkan probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja
 $H_a (I) = \beta_1 > 0$; Peningkatan Pendapatan (I) meningkatkan probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja
2. $H_0 (Edu) = \beta_2 = 0$; Peningkatan Pendidikan (Edu) tidak meningkatkan probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja
 $H_a (Edu) = \beta_2 > 0$; Peningkatan Pendidikan (Edu) meningkatkan probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja
- $H_0 (U) = \beta_3 = 0$; Peningkatan Usia (U) tidak meningkatkan probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja
 $H_a (U) = \beta_3 > 0$; Peningkatan Usia (U) meningkatkan probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja
3. $H_0 (G) = \beta_4 = 0$; Jenis Kelamin (G) Perempuan tidak meningkatkan Probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja

Ha (G) = $\beta_4 > 0$; Jenis Kelamin (G) Perempuan meningkatkan probabilitas

nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja

4. Ho (PMP) = $\beta_5 = 0$; Peningkatan Pengetahuan tentang program JKK (PMP) tidak meningkatkan probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja

Ha (PMP) = $\beta_5 > 0$; Peningkatan variabel Pengetahuan tentang program JKK

meningkatkan probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja

3.6.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 30 orang pengemudi ojek *online*/responden untuk mengetahui apakah kuisioner yang digunakan dapat dilanjutkan atau tidak. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas menggunakan EViews

Variabel	Nilai <i>significant</i>	Kesimpulan
I	0.0005	Valid
EDU	0.0001	Valid
U	0.0043	Valid
G	0.0005	Valid
PMP	0.0010	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data, Lampiran 1.

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, hasil uji validitas menunjukkan bahwa untuk variabel pendidikan, pendapatan, pengetahuan tentang program, jenis kelamin dan usia memiliki nilai signifikansi < 0.05 , sehingga variabel tersebut valid.

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas

Nilai Cronbach Alpha	Kriteria	Kesimpulan
0,98	Nilai CA > 0.6	Instrumen Reliabel

Sumber : Hasil pengolahan data, Lampiran 2.

Berdasarkan hasil perhitungan Cronbach Alpha ditemukan hasil sebesar 0,98 dimana nilai CA tersebut lebih besar dari 0.6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan reliabel.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan, tingkat Pendidikan dan Pengetahuan mengenai program JKK berpengaruh meningkatkan probabilitas nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja, sedangkan dua variabel lainnya yaitu usia dan jenis kelamin tidak berpengaruh meningkatkan atau menurunkan nilai WTP Jaminan Kecelakaan Kerja.
2. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata *Willingness To Pay* Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pengemudi ojek *online* dari penelitian ini adalah sebesar Rp 15.700,-/bulan atau ada peningkatan sebesar Rp 5.700,-/bulan (57%) dibandingkan iuran yang dibayarkan saat ini. Nilai total WTP pada penelitian ini adalah sebesar Rp 95.974.100,-. Nilai ini menunjukkan total nilai yang bisa didapatkan BPJS Ketenagakerjaan apabila seluruh pengemudi ojek *online* Go-Jek bersedia ikut serta dan membayar iuran sebesar Rp 15.700,-/bulan. Responden bersedia membayar lebih besar apabila terdapat peningkatan manfaat dan kualitas pelayanan.
3. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebesar 73% responden lebih memilih menyukai manfaat dari BPJS Kesehatan dikarenakan BPJS Kesehatan lebih sering digunakan dan informasi terkait program dan manfaatnya lebih terinformasi, sedangkan sebesar 27% responden memilih lebih menyukai manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang lebih memiliki banyak manfaat.

5.2 Saran

Saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, variabel yang paling tinggi probabilitasnya dalam meningkatkan nilai WTP adalah tingkat pendidikan kemudian pengetahuan mengenai program dan tingkat pendapatan. Oleh sebab itu untuk dapat meningkatkan nilai WTP tingkat Pendidikan dapat ditingkatkan dengan peran pemerintah untuk lebih ketat dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program diperlukan peran BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan informasi yang lebih luas dan merata kepada para pekerja informal sehingga masyarakat lebih paham terkait manfaat dan program yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk meningkatkan tingkat pendapatan, pemerintah dapat membantu dengan mendorong Perusahaan mitra untuk memberikan pendapatan minimum setara dengan Upah Minimal Kota.
2. Terdapat kenaikan sebesar 57% nilai WTP dari Rp 10.000,- menjadi Rp 15.700,00. Untuk meningkatkan nilai WTP tersebut diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat serta kemudahan dalam melakukan pembayaran maupun pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.
3. Preferensi ojek online dalam memilih antara manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 73% lebih menyukai manfaat BPJS Kesehatan, salah satu yang menjadi alasan ialah manfaatnya lebih terinformasi, oleh sebab itu dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik lagi sehingga penyebaran informasi lebih merata dan *branding* yang lebih baik lagi sehingga masyarakat dapat membedakan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Diperlukan peran pemerintah untuk dapat memberikan intervensi lebih yang berbentuk kebijakan-kebijakan sehingga pekerja informal dapat lebih terjamin kesejahteraannya.
5. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak menganalisis dengan membandingkan antara pekerja formal dan pekerja informal, serta penambahan variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan lengkap terkait faktor yang mempengaruhi WTP Jaminan Kecelakaan Kerja. Maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk

dapat menambahkan variabel lain serta melakukan perbandingan antara pekerja formal dan pekerja informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S. (2009). Analisis *Willingness To Pay* Pengunjung Obyek Wisata Danau Situgede Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan. Ipb University. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/14375>
- Aryani, M., & Muqorrobin, M. (2013). Determinan Willingness To Pay (Wtp) Iuran Peserta Bpjs Kesehatan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(1), 44–57. <https://doi.org/10.18196/jesp.14.1.1245>
- A. Samuelson Paul & William D Nordhaus. (1997). Mikroekonomi. Jakarta: Erlangga
- Basaza, R., Kyasiimire, E.P., Namyolo, P.K., Kawooya, A., Nnamulondo, P., dan Alier, K.P. 2019. *Willingness to pay for Community Health Insurance Among Taxi Drivers in Kampala City, Uganda: A Contingent Valuation*. Risk Management and Health Care Policy, Volume 12, 133-143.
- Boediono. (1998). Ekonomi Moneter Pengantar Ekonomi No.5. Yogyakarta: BPFE.
- Damanik, D., Studi, P., Pembangunan, E., Simalungun, U., Utara, S., & Methods, C. V. (2019). *WILLINGNESS TO PAY (WTP) PENGUNJUNG MUSEUM SIMALUNGUN DI KOTA PEMATANGSIANTAR* *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 2 No 3 Bulan November 2019* *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 2 No 3 Bulan November 2019*. 2(1), 9–16.
- Dwiyanto, A. (2017). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaborasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Emalia, Z. (2016). *Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Penggunaan Jasa Pengolahan Sampah*. 9(1).
- Gustafsson-Wright, E., Asfaw, A., & van der Gaag, J. (2009). Willingness to pay for health insurance: An analysis of the potential market for new low-cost health insurance products in Namibia. *Social Science and Medicine*, 69(9), 1351–1359. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.08.011>
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS

cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika. Buku 1 Edisi 5*. PT. Salemba Empat. Jakarta.

Hajek, A., Enzenbach, C., Stengler, K., Glaesmer, H., Hinz, A., Röhr, S., Stein, J., Riedel-Heller, S. G., & König, H. H. (2020). Determinants of Willingness to Pay for Health Insurance inSS Germany—Results of the Population-Based Health Study of the Leipzig Research Centre for Civilization Diseases (LIFE-Adult-Study). *Frontiers in Publik Health*, 8(August), 1–6. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00456>

Hardika, C. P., & Purwanti, E. Y. (2020). *ANALISIS WILLINGNESS TO PAY TERHADAP IURAN BPJS KESEHATAN PADA PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA*. 9, 131–143.

Handayani, E., Gondodiputro, S., dan Saefullah A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Masyarakat Membayar Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Universitas Padjajaran, Bandung.

Hanley, N. and C.L. Splash. (1993). *Cost-Benefit Analysis and Environmental*, England : Edward Elgar Publishing

Hildayanti, A. N., & Batara, A. S. (2021). *Determinan Ability To Pay dan Willingness To Pay Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kecamatan Takabonerate (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar) Determinants of the Ability To Pay and the Willingness To Pay Subscription of BPJS Kesehatan on Independents in Takabonerate District (Case Study in Selayar Islands District)*. 11, 30–37.

Huntari, Dewi. (2015). Analisis *Willingness To Pay* Masyarakat Terhadap Penggunaan Jasa Pengolahan Sampah (Studi Kasus Pada Kelurahan Rajabasa Raya). Skripsi.

Indramawan, D. P. (2014). Analisis Willingness To Pay Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. *Tugas Akhir*.

Karim, A. W. 2008. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kotler, Philip. 2009. Manajemen Pemasaran. Edisi Ketiga belas. Jakarta: PT. Indeks.

Kofoworola, Y., Id, O., Akomolafe, B., & Ohri, K.. (2019). *Factors Influencing Willingness and Ability to Pay for Social Health Insurance in Nigeria*. PloS One, 14(8),1-10.

Lofgren, C, Thanh, N.X., Chuc, N.T., Emmelin, A., & Lindholm, L. (2008). People's willingness to pay for health insurance in rural Vietnam. *Cost*

Effectiveness and Resource Allocation, 6(1),16.
<https://doi.org/10.1186/1478-7547-6-16>

- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, G. 2011. Ekonomi Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE
- Mankiw, N. Gregory. 2006. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset
- Mehr, Robert. I. Bob A. Hedges. 1977. *Risk Management: Concept and Applications*.
- Mershed, M., Busse, R., & Ginneken, E. (2012). Healthcare financing in Syria: qualitative study of householders' views: HEALTHCARE FINANCING IN SYRIA. *The International Journal of Health Planning and Management*, 27(2), 167-179. <https://doi.org/10.15562/bmj.v8i3.958>
- Miti, J. J., Perkio, M., Metteri, A., & Atkins, S. (2021). Factors associated with willingness to pay for health insurance and pension schemes among informal economy workers in low- and middle-income countries: a systematic review. *International Journal of Social Economics*, 48(1), 17–37. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2020-0165>
- Moenir. 2010. Manajemen Pelayanan Umum. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Mulyatno, N. (n.d.). *FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR (WILLINGNESS TO PAY) DAN KEMAMPUAN MEMBAYAR (ABILITY TO PAY) PASIEN POLI UMUM PADA RSUD KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN METODE CONTINGENT*. 300–319.
- Nazir.Moh, Ph.D. 2009. *Metode Penelitian*. GHALIA Indonesia. Jakarta Selatan.
- Nguyen, L. H., & Hoang, A.T. D. (2017). Willingness to Pay for Social Health Insurance in Central Vietnam. *Frontiers in Public Health*, 5.
- Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT. Rineka Cipta
- Oktaviani, M., & Saptutyingsih, E. (2018). Pengaruh Gender dan Faktor-Faktor Lain Terhadap Willingness to Pay Petani untuk Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*.
- Oktora, R., & . P. (2018). Willingness to Pay for National Health Insurance Among Motorcycle Taxi Drivers in Depok City, Indonesia. *KnE Life Sciences*, 4(1), 190. <https://doi.org/10.18502/cls.v4i1.1381>

- On Madya, S. D., & Nurwahyuni, A. (2019). Determinan Sosial Ekonomi Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Tenaga Kerja Informal di Indonesia: Analisis Data SUSENAS 2017. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/eki.v3i2.2990>
- Pasaribu, V. L. D., Kris Baldy. (2011). *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Peraturan Menteri Perhubungan. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
- PERATURAN PEMERINTAH. (2015). PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
- Pertiwi, T.A., Noechdijati, D.E., Dharmawan, B. (2022). Analisis Kesiediaan Membayar (*Willingness To Pay*) Pengunjung Dalam Upaya Pengembangan Agrowisata "SWEETBERRY" di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.02.1>
- Pratiwi, S.R., Kasmawati. (2019). *Willingness To Pay Masyarakat Dalam Mengurangi Dampak Sampah Rumah Tangga*. JEP Vol 8
- Prasetya, F. (2012). *Modul Ekonomi Publik Bagian IV: Teori Barang Publik*. Malang : Universitas Brawijaya
- Rianti, S., Rusli, Z., Yuliani, F. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15 (3)
- Ronaldo, R. (2018). *Why is Insurance so Important? Cara Mudah Mengetahui Asuransi*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Samuelson Paul & William D Nordhaus. (1997). *Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Saptutyningsih, Endah. (2007). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Willingness To Pay* Untuk Perbaikan Kualitas Air Sungai Code di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol 8.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Deepublish. Yogyakarta

- Sihaloho, E, N. (2015). Determinan Kemauan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- Sukirno, Sadono. (2005). Pengantar Mikro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sumarwan, Ujang. (2002). Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Suharjito, S., & Wibowo, A. (2014). Estimasi Willingness To Pay Pekerja Konstruksi Gedung Membayar Premi Asuransi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Teknik Sipil*, 21(1), 45. <https://doi.org/10.5614/jts.2014.21.1.5>
- Stiglitz, J. 2000. *Economics of the Public Sector*, New York : W.W Norton & Company.
- Undang-Undang. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.
- Undang-Undang. (2011). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
- Undang-Undang. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
- Undang-Undang Dasar. (1945). UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA
- Wasistiono, Sadu. 2005. Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan. Modul Badan Diklat Depdagri-JICA
- Wening,S. (2015). Membentengi Keluarga Terhadap Budaya Konsumerisme Dengan Nilai-Nilai Kehidupan Dalam Pendidikan Konsumen. *Jurnal KELUARGA*.
- Whitehead, J.C., (2005). Combining Willingness To Pay and Behavior Data With Limited Information, *Resource and Energy Economics*.
- Widagdo, B., Lestari, N.P., (2018). Manajemen Risiko dan Asuransi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang